

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan dalam peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat. Pada tahun 2011 jumlah produksi ikan di Indonesia sebesar 13,6 juta ton, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga yakni Malaysia dengan jumlah produksi ikan sebesar 1,60 juta ton. Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut, yaitu kurang lebih 5,8 juta km dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Pada tahun 2015 secara nasional Indonesia memiliki tingkat konsumsi ikan sebesar 41,11kg/kapita/tahun. Angka tersebut masih jauh dibawah Malaysia yang sebesar 70 kg/kapita/tahun (KKP dalam Detik Finance,2017).

Rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia tentu saja membutuhkan perhatian khusus dari berbagai kalangan khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah giat mengampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Program ini dicanangkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 4 april 2004. Kampanye GEMARIKAN diadakan sebagai upaya Pemerintah dalam memberikan edukasi serta sosialisasi guna meningkatkan konsumsi ikan nasional. Hal ini dilakukan mengingat mengkonsumsi ikan merupakan hal yang sangat penting karena pada ikan terdapat berbagai kandungan serta manfaat bagi tubuh manusia. Kampanye yang dilakukan yakni dengan melakukan sosialisasi, edukasi, pengadaan lomba masak ikan serta pengadaan makan ikan gratis.

Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dilakukandengan menyasar berbagai sekolah, mulai dari PAUD, TK, Sekolah Dasar hingga sekolah menengah atas. Selain itu, kampanye juga dilakukan terhadap ibu rumah tangga serta ibu-ibu PKK sebagai upaya penyadaran akan pentingnya mengkonsumsi ikan. Kampanye GEMARIKAN diadakan olehKementerian Kelautan dan Perikanan di berbagai daerah di Indonesia dengan bekerja sama dengan dinas kelautan dan perikanan masing-masing daerah.Salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerima sosialisasi Gemarikan yaitu DIY. DI Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menempati posisi terendah dalam angka konsumsi ikan nasional.

Tabel 1. Konsumsi Ikan Menurut Provinsi tahun 2010-2014 (kg/kap/tahun)

Provinsi	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Nasional	30,48	32,25	33,89	35,21	38,14
Lampung	21,65	22,31	24,41	25,30	26,61
Jawa Barat	19,52	20,79	22,67	25,28	24,56
Jawa Tengah	12,81	15,51	17,71	19,16	20,27
DI Yogyakarta	9,92	13,60	14,55	16,60	21,74
Jawa Timur	19,01	21,41	23,35	24,46	27,89

Diolah dari Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015 dalam Giantara (2018).

Berdasarkan data Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2015, pada tahun 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang menempati posisi kedua paling bawah dalam peringkat konsumsi ikan secara nasional dari 33 provinsi di Indonesia. Meskipun berada diposisi terendah, tingkat konsumsi ikan di DI Yogyakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2. Konsumsi Ikan DI Yogyakarta tahun 2014-2017 (kg/kap/tahun)

Tahun	Tingkat Konsumsi Ikan
2014	21,74
2015	23. 07
2016	23. 10
2017	23. 75

Bappeda Yogyakarta, 2018

Berdasarkan data Bappeda Yogyakarta, pada tahun 2017 tingkat konsumsi ikan masyarakat DIY telah meningkat dari tahun sebelumnya namun masih jauh dari tingkat konsumsi ikan nasional yakni sebesar 47 kilogram per kapita per tahun (KKP: Konsumsi Ikan Ditargetkan 50,8 Kg per Kapita pada 2018, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan mulai meningkat namun peningkatannya masih sangat sedikit.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di DIY yang telah menerima sosialisasi Gemarikan. Berdasarkan data BPS, Kota Yogyakarta merupakan salahsatu wilayah DIY dengan tingkat konsumsi ikan yang rendah.Pada tahun 2017, dengan jumlah penduduk sebanyak 422. 732,00, Kota Yogyakarta memiliki tingkat konsumsi ikan sebesar 18 kilogram perkapita pertahun, angka tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan nasional yang mencapai 47 kg per kapita per tahun (KKP: Konsumsi Ikan Ditargetkan 50,8 Kg per Kapita pada 2018).

Tabel 3. Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten/Kota di DIY (Kg / Perkapita)

Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017
Gunungkidul	11,20	10,51	15,46	18,54	19,14
Bantul	15,67	14,51	21,05	21,15	21,31
Kulon Progo	8,48	8,61	16,45	16,50	16,61
Sleman	23,46	23,78	22,53	25,65	25,81
Kota Yogyakarta	26,46	21,70	22,35	25,92	17,73

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kota Yogyakarta merupakan kabupaten di DIY dengan angka konsumsi ikan kedua terendah setelah Kulon Progo. Dalam kurun waktu 2016-2017 di Kota Yogyakarta terjadi

penurunan tingkat konsumsi ikan yang signifikan sebesar 8.19 Kg/ Perkapita. Hal ini dinilai sebagai sebuah ketidakwajaran mengingat Kota Yogyakarta termasuk daerah yang telah menerima sosialisasi Gemarikan. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat dan perilaku konsumsi. Berdasarkan penelitian Cahyani (2014), Eko (2016), Dexna (2013) dan Rakhmawati (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan, persepsi terhadap harga, pendapatan keluarga dan ketersediaan ikan terhadap minat dan perilaku. Selain itu, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kotler (2005) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara minat dengan perilaku. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui minat dan perilaku konsumsi ikan masyarakat Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan terhadap ikan, persepsi terhadap harga, pendapatan keluarga dan ketersediaan ikan dengan minat konsumsi ikan masyarakat Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan terhadap ikan, persepsi terhadap harga, pendapatan keluarga, ketersediaan ikan dan minat konsumsi ikan dengan perilaku konsumsi ikan masyarakat Kota Yogyakarta.

C. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi serta masukan bagi pemerintah, khususnya pembuat kebijakan dalam menentukan program serta kebijakan yang tepat dalam peningkatan konsumsi ikan masyarakat.